

SEBUAH PENELITIAN KEPUSTAKAAN: PENGENDALIAN INFLASI, MONETER DAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MAKRO ISLAM

Pani Akhiruddin Siregar¹, Indri Yani Rangkuti², Fitri Dewi Inayah³, Nabila Ardini⁴,
Aditya Naya⁵

paniakhiruddin@umsu.ac.id¹, indrianirangkuti6@gmail.com², fitridewiinayah@gmail.com³,
ardininabila398@gmail.com⁴, aditanayaa11@gmail.com⁵

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang peran serta efektivitas kebijakan moneter dan fiskal dalam mengendalikan inflasi dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) sebagai metode. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, penelitian ini akan mengeksplorasi strategi-strategi yang sesuai untuk mengelola inflasi yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan etis dalam Islam. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan moneter dan fiskal merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah dalam mengelola perekonomian suatu negara. Kebijakan moneter, dijalankan oleh bank sentral, bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar guna mencapai stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Sementara itu, kebijakan fiskal, dilaksanakan oleh pemerintah melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara, juga berperan dalam mengarahkan kondisi ekonomi menuju stabilitas. Kedua kebijakan ini saling mendukung dalam mengelola perekonomian, termasuk dalam mengendalikan inflasi, yang merupakan tantangan yang perlu ditangani dengan cermat. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip-prinsip keuangan yang adil dan seimbang juga menjadi pertimbangan penting dalam perancangan kebijakan moneter dan fiskal. Oleh karena itu, kerjasama antara bank sentral, pemerintah, dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam sangat penting dalam mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Makro Islam, Fiskal, Inflasi, dan Kebijakan Moneter.

ABSTRACT

This study aims to investigate further the role and effectiveness of monetary and fiscal policies in controlling inflation from an Islamic economic perspective. This study used library research as method. By considering the principles of Islamic economics, this study will explore appropriate strategies to manage inflation that are in line with moral and ethical values in Islam. Based on the discussion, it can be concluded that monetary and fiscal policies are the main instruments used by the government in managing a country's economy. Monetary policy, run by the central bank, aims to regulate the amount of money in circulation in order to achieve macroeconomic stability and positive economic growth. Meanwhile, fiscal policy, implemented by the government through the regulation of state revenues and expenditures, also plays a role in directing economic conditions towards stability. These two policies support each other in managing the economy, including in controlling inflation, which is a challenge that needs to be addressed carefully. In the context of Islamic economics, the principles of fair and balanced finance are also important considerations in the design of monetary and fiscal policies. Therefore, cooperation between the central bank, the government, and an understanding of the principles of Islamic economics are essential in achieving sustainable economic stability.

Keywords: Fiscal Inflation, Islamic Macroeconomics, and Monetary Policy.

PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang inflasi mulai mencuat di Indonesia ketika tingkat inflasi melonjak tajam hingga mencapai 650 persen pada pertengahan tahun 1960-an. Inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi yang paling ditakuti oleh suatu negara. Secara

sederhana, inflasi dapat dijelaskan sebagai peningkatan harga secara umum dan terus-menerus dalam rentang waktu yang spesifik (Bank Indonesia, 2020).

Tingkat inflasi yang terkendali menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Di dalam kerangka ekonomi Islam, pendekatan terhadap inflasi tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek moral dan etis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, upaya mengendalikan inflasi haruslah sejalan dengan prinsip keadilan, keberpihakan pada kaum lemah, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan moneter dan fiskal haruslah dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut.

Kebijakan moneter dan fiskal memiliki peran yang saling terkait dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter, menggunakan instrumen seperti pengaturan suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti pengeluaran dan pendapatan negara, juga dapat memengaruhi tingkat inflasi melalui dampaknya terhadap permintaan agregat.

Dalam konteks ekonomi global, kebijakan moneter dan fiskal harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pasar global yang terus berubah. Faktor-faktor seperti fluktuasi harga komoditas internasional, perubahan kondisi ekonomi global, dan gejolak nilai tukar mata uang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap inflasi di tingkat domestik. Oleh karena itu, kebijakan moneter dan fiskal perlu diatur secara bijaksana untuk menghadapi tantangan yang kompleks ini.

Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang peran serta efektivitas kebijakan moneter dan fiskal dalam mengendalikan inflasi dari perspektif ekonomi Islam. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, penelitian ini akan mengeksplorasi strategi-strategi yang sesuai untuk mengelola inflasi yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan etis dalam Islam. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman kita tentang pengendalian inflasi yang holistik dan berkelanjutan dalam konteks ekonomi Islam.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kajian Pustaka (*library research* yang mana, menurut Danandjaja (2014), penelitian kepustakaan adalah proses penyusunan bibliografi secara sistematis dan ilmiah, yang mencakup pengumpulan berbagai materi bibliografi yang relevan dengan tujuan penelitian, penerapan metode pengumpulan data melalui sumber-sumber kepustakaan, serta pengaturan dan penyajian informasi yang terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi-strategi yang cocok untuk mengatasi inflasi sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etis dalam Islam. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan penting dalam memperdalam pemahaman kita tentang pengelolaan inflasi secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi Islam.

Melalui pendekatan *library research*, diharapkan artikel ini dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai bagaimana bank sentral dapat efektif mengendalikan tekanan harga melalui kebijakan moneter yang tepat, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi perekonomian secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Moneter dan Fiskal

1. Kebijakan Moneter

Perkembangan ekonomi suatu negara sering mengalami fluktuasi yang dikenal sebagai siklus, di mana pada beberapa periode terjadi pertumbuhan ekonomi yang cepat, sementara pada periode lain terjadi perlambatan. Untuk mengelola dan memengaruhi perkembangan ekonomi agar tetap stabil, pemerintah atau otoritas moneter sering kali menerapkan langkah-langkah yang dikenal sebagai kebijakan ekonomi makro. Inti dari kebijakan ini adalah mengelola permintaan dan penawaran di perekonomian agar mencapai keseimbangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter, sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, umumnya disesuaikan dengan siklus kegiatan ekonomi atau business cycle.

Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah yang diambil oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan tujuan mencapai perkembangan ekonomi yang diinginkan. Dalam praktiknya, tujuan dari perkembangan ekonomi yang diinginkan ini adalah mencapai stabilitas ekonomi makro, yang mencakup stabilitas harga (rendahnya tingkat inflasi), peningkatan output riil (pertumbuhan ekonomi yang positif), dan tersedianya lapangan kerja yang cukup luas (Warijiyo & Solikin, 2003).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi suatu negara mengalami fluktuasi yang dikenal sebagai siklus, di mana pada beberapa periode terjadi pertumbuhan ekonomi yang cepat, sementara pada periode lain terjadi perlambatan. Untuk mengelola dan memengaruhi perkembangan ekonomi agar tetap stabil, pemerintah atau otoritas moneter sering kali menerapkan langkah-langkah yang dikenal sebagai kebijakan ekonomi makro.

2. Inflasi

Inflasi adalah peningkatan umum dalam tingkat harga barang dan jasa. Berbagai faktor dapat menyebabkan inflasi, termasuk inflasi alami, kesalahan manusia, tekanan biaya, spiral inflasi, dan inflasi impor (Kurniawati, 2019). Pemerintah biasanya memberikan perhatian khusus pada inflasi jika tingkat inflasi suatu negara tinggi, karena tingkat inflasi yang tinggi dapat memiliki berbagai dampak negatif. Secara umum, inflasi dianggap sebagai masalah yang berbahaya karena dampak merugikan yang signifikan. Inflasi dapat mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, sambil juga mengganggu harga-harga. Ini juga dapat mengganggu perencanaan ekonomi dan memperburuk ketidakstabilan sosial dan politik. Oleh karena itu, di banyak negara, inflasi diperlakukan sebagai "penyakit" dan pemerintah menerapkan langkah-langkah moneter dan fiskal yang konservatif serta berkelanjutan untuk melawannya (Lestari, Utami, dan R, 2014).

Inflasi adalah peningkatan harga secara umum dan berkelanjutan selama periode waktu yang panjang. Lebih dari sekadar angka di atas kertas, gagasan inflasi cenderung dilihat sebagai realitas yang dapat dirasakan oleh masyarakat (inflasi yang ditekan). Secara umum, ini mencakup peningkatan biaya sebagian besar produk dan layanan daripada hanya satu atau dua jenis. Inflasi yang berkelanjutan merujuk pada peningkatan harga yang terjadi secara berkala dan tidak instan.

Menurut Pujadi (2022), inflasi dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:

- a) Inflasi dorongan biaya (Cost Push Inflation) dan
 - b) Inflasi permintaan penuh (Demand Full Inflation)
- adalah dua bentuk inflasi yang menyumbang pada inflasi konvensional.

Dalam pandangan Islam, ada tiga faktor yang dapat menciptakan inflasi: 1) Inflasi organik, yang muncul dari sebab-sebab alami dan tidak dapat dikendalikan oleh individu;

2) Inflasi kesalahan manusia, yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh manusia;
3) Pasar emosional, yang berkaitan dengan permintaan kuat terhadap produk dan layanan yang dipicu oleh faktor-faktor sosial, agama, budaya, dan perilaku. Dengan demikian, inflasi merupakan fenomena kompleks yang dapat dipahami melalui berbagai perspektif, tergantung pada kerangka acuan dan konteksnya.

3. Fiskal

Pemerintah dalam kerangka Islam memiliki peran penting dan tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan seluruh warganya di semua aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat secara umum (Lismanto dan Utama, 2020). Dalam ranah ekonomi, peran pemerintah tercermin dalam kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan (S. Hayati, 2020). Sejarah mencatat bahwa kebijakan fiskal pada masa Islam telah mengalami berbagai perkembangan, baik dalam hal kemajuan maupun kemunduran (Mubarok, 2021).

Jika kita melihat ke masa lalu, terutama pada masa keemasan Islam, sejarah menunjukkan bahwa Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan peradaban, termasuk dalam bidang ekonomi (Almizan, 2016). Prinsip ekonomi makro Islam menekankan bahwa kebijakan fiskal dan anggaran negara bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh warga dengan cara mendistribusikan kekayaan secara adil, sambil selalu memperhatikan nilai-nilai spiritual dan material secara seimbang (Aini, 2019).

Kebijakan moneter, inflasi, dan kebijakan fiskal adalah tiga aspek penting dalam mengelola perekonomian suatu negara. Siklus ekonomi yang sering terjadi membutuhkan penanganan yang cermat dari pemerintah atau otoritas moneter melalui kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar agar mencapai stabilitas ekonomi makro yang diinginkan, termasuk stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi positif, dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Sementara itu, inflasi merupakan fenomena kompleks yang dapat dipahami melalui berbagai perspektif, baik dari segi penyebab maupun dampaknya. Dalam pandangan Islam, inflasi dapat dipicu oleh faktor-faktor alami, kesalahan manusia, dan kondisi pasar yang emosional. Di sisi lain, kebijakan fiskal juga memiliki peran penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan seimbang, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam konteks ini, kesimpulan yang dapat ditarik adalah pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter, penanganan inflasi, dan kebijakan fiskal dalam mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter yang tepat dapat membantu mengendalikan inflasi dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sementara itu, kebijakan fiskal yang bijaksana dan berorientasi pada prinsip-prinsip Islam dapat memastikan distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga. Dengan demikian, kerjasama antara otoritas moneter, pemerintah, dan masyarakat sangatlah penting dalam mencapai tujuan bersama dalam mengelola perekonomian suatu negara.

Pengendalian inflasi dalam Perspektif Ekonomi Makro

Bank Indonesia dan Pemerintah secara berkelanjutan berupaya mencapai target inflasi yang telah ditetapkan dengan mengkoordinasikan kebijakan secara konsisten. Salah satu strategi untuk mengendalikan inflasi menuju tingkat yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar sesuai dengan target inflasi yang telah ditetapkan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan target inflasi. Namun, setelah pengesahan UU tersebut, pemerintah yang menetapkan target inflasi untuk meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia. Kebijakan moneter Bank Indonesia bertujuan untuk mengelola tekanan inflasi yang berasal dari permintaan agregat relatif terhadap kondisi penawaran.

Dalam hal ini, kebijakan moneter tidak dimaksudkan untuk menanggapi kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor kejutan sementara yang cenderung hilang seiring berjalannya waktu (Saiyed, 2021).

Pembahasan tentang inflasi tidak dapat dihindari tanpa mempertimbangkan jenis-jenisnya, yaitu inflasi merayap dan inflasi yang berkelanjutan, yang dianggap serius ketika melebihi 5%. Pemerintah harus mencari cara untuk mengatasi jenis inflasi ini, meskipun mencapai inflasi nol persen (zero inflation) merupakan tujuan yang sulit untuk direalisasikan dalam sistem perekonomian nasional. Untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, pemerintah perlu memastikan tingkat inflasi tetap di bawah 5%. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi adalah melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal melibatkan pengurangan pengeluaran pemerintah yang diatur oleh Kementerian Keuangan, sementara kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pengendalian Moneter dan Fisika dalam Perspektif Ekonomi Makro

Pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter oleh kedua lembaga ini haruslah saling mendukung tanpa bertentangan. Bank Indonesia, sebagai lembaga moneter, dapat mengambil langkah-langkah seperti mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Kebijakan ini dapat mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, Kementerian Keuangan, melalui kebijakan fiskal, dapat mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu serta perusahaan. Tindakan ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah, investasi, dan pengeluaran rumah tangga (Sukirno & Sadono, 2015).

Salah satu langkah yang diambil Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi adalah dengan menerapkan suku bunga kebijakan baru, yaitu BI 7-Day (reverse) Repo Rate, yang mulai berlaku sejak 19 Agustus 2016. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat operasi moneter dan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Dalam konteks ekonomi Islam, meskipun tidak ada instrumen moneter yang digunakan pada awal periode Islam, pemerintah menggunakan operasi pasar terbuka, seperti jual beli surat berharga, sebagai instrumen kebijakan moneter saat ini.

Dalam konteks kebijakan moneter yang diterapkan saat ini oleh pemerintah, jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, tidak terdapat instrumen kebijakan moneter yang digunakan pada awal periode Islam karena belum ada sistem perbankan seperti sekarang ini. Namun, pemerintah menggunakan instrumen lain, yaitu operasi pasar terbuka, termasuk jual beli surat berharga, untuk mengatur kebijakan moneter. Operasi pasar terbuka ini juga tidak ada dalam sejarah ekonomi Islam pada awal perkembangannya. Meskipun demikian, sistem yang telah diterapkan oleh pemerintah terkait dengan konsumsi, tabungan, investasi, dan perdagangan telah menciptakan instrumen secara otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter (Karim, 2017).

Sementara itu, dalam teori makroekonomi, kebijakan fiskal adalah suatu upaya dalam mengarahkan kondisi perekonomian menuju perbaikan dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Instrumen penting dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Pemerintah merancang proporsi yang sesuai antara kedua aspek tersebut untuk mencapai stabilitas ekonomi. Beberapa pilihan instrumen kebijakan fiskal yang umum dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro antara lain:

- 1) Penyesuaian pajak rumah tangga;
- 2) Pengaturan pengeluaran pemerintah untuk sektor tertentu;
- 3) Memberikan insentif atau subsidi kepada sektor tertentu.

KESIMPULAN

Kebijakan moneter dan fiskal adalah dua instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian suatu negara. Kebijakan moneter, yang dijalankan oleh bank sentral, bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian guna mencapai stabilitas ekonomi makro, termasuk stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Sebaliknya, kebijakan fiskal, yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara, juga berperan penting dalam mengarahkan kondisi ekonomi menuju perbaikan dan stabilitas. Dua instrumen ini haruslah saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama dalam mengelola perekonomian, termasuk upaya untuk mengendalikan inflasi. Inflasi, sebagai peningkatan umum dalam tingkat harga barang dan jasa, merupakan tantangan yang perlu ditangani dengan cermat melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip-prinsip keuangan yang adil dan seimbang juga menjadi pertimbangan penting dalam merancang kebijakan moneter dan fiskal. Oleh karena itu, kerjasama antara bank sentral dan pemerintah serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam sangatlah penting dalam mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1 (2), 203–22.
- Astuti, T. S., & Eddyono, L. W. (2021). Peran Bank Indonesia Dan Pembangunan Hukum Di Bidang Moneter Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3).
- Bank Indonesia. 2020. “Fungsi Utama Bank Sentral.” 2020.<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>.
- Danandjaja, J. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Antropologi Indonesia.
- Hayati, Tri. 2019. Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49 (3), 768. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>.
- Karim, Adiwarmanto. (2017). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurniawati, Fitri. (2019). “Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6 (2). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1252>.
- Lismanto & Utama, Y. J. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416–33.
- Mubarok, Ferry Khusnul. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis pada Masa Umar Bin Khattab. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8 (1). 81. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>.
- Nopirin. (1992). *Ekonomi Moneter*, Buku II, Edisi I. Yogyakarta: BPFE.
- Pujadi, Arko. (2022). “Inflasi: Teori Dan Kebijakan.” *Jurnal Manajemen Diversitas* 2 (2): 73–77. <https://www.febjayabaya.ac.id/>.
- Saiyed, R. (2021). Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Jurnal Ilmiah Bongaya (JIB)*, 05(01), 42–50.
- Sukirno & Sadono, (2015) *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Warjiyo, P., & Solikin. (2003). *Kebijakan Moneter di Indonesia*. Jakarta: Pusat. Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.